BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti uraikan tentang manajemen data profil kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026, kesimpulan yang dapat diambil peneliti adalah sebagai berikut :

Kualitas data Profil Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan secara umum telah memenuhi standar kelengkapan melalui verifikasi sistematis. Namun, ketepatan waktu dan konsistensi belum optimal akibat keterlambatan pelaporan, perbedaan waktu penarikan data, serta belum terintegrasinya sistem informasi kesehatan. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan penyusunan profil dan perbedaan data antarprogram, sehingga diperlukan penguatan integrasi sistem dan standardisasi prosedur untuk meningkatkan akurasi data.

Tata kelola manajemen data profil kesehatan telah mengacu pada pedoman dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Akan tetapi, implementasi tata kelola ditingkat daerah belum berjalan secara optimal karena belum seluruh program dan Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menyebabkan secara khusus pengelolaan data dan informasi kesehatan. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan pengelolaan data belum sepenuhnya seragam serta masih bergantung pada mekanisme koordinasi antar unit kerja.

Sumber daya manusia merupakan faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan manajemen data Profil Kesehatan. Meskipun sebagian besar pengelolaan data memiliki latar belakang pendidikan sarjana, kompetensi teknis belum didukung secara optimal melalui pelatihan yang berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan jumlah petugas, beban kerja yang tinggi akibat perangkapan tugas, serta keterbatasan sarana dan anggaran menjadi kendala dalam pelaksanaan pengelolaan data secara efektif dan efisien.

Pengelolaan data Profil Kesehatan telah dilaksanakan melalui tahapan pengumpulan, pengolahan, validasi, penyimpanan, dan penyajian data secara berjenjang sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Proses verifikasi, dan validasi data telah diterapkan sebagai upaya menjaga kualitas data sebelum dipublikasikan. Namun demikian, sebagian besar proses masih dilakukan secara manual dan belum didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi, sehingga mempengaruhi efisiensi proses kerja, ketepatan waktu penyusunan Profil Kesehatan, serta optimalisasi pemanfaatan data sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan di bidang Kesehatan.

B. Rekomendasi

Saran yang dapat kami berikan sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan perlu memperkuat tata kelola data profil kesehatan melalui penyusunan dan penerapan SOP yang lebih jelas, peningkatan koordinasi antar unit, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin kualitas data.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia perlu dilakukan secara berkesinambungan melalui pelatihan, pendampingan teknis, dan penyesuaian beban kerja petugas pengelola data agar proses pengumpulan dan pengolahan data dapat berjalan lebih efektif.
3. Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pelaporan terintegrasi perlu dioptimalkan untuk meningkatkan ketepatan waktu, kelengkapan, dan konsistensi data profil kesehatan sehingga informasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan kesehatan yang tepat yang berbasis *evidence based.*

C. Produk Tesis

Karya tesis dalam penelitian ini berupa surat edaran dan *policy brief* yang dapat memberikan masukan kepada pimpinan terkait manajemen data profil pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan sehingga kendala-kendala yang dihadapi selama ini dapat terselesaikan dan memudahkan bagian Data dan

Informasi untuk menyelesaikan pekerjaannya dan profil bisa terbit sesuai dengan jadwal.

Produk tesis ini memberikan kejelasan masalah-masalah yang terjadi serta solusi yang ditawarkan meliputi (1) Peningkatan Kualitas Data (Kelengkapan, Ketepatan dan Konsisten) (2) Data Up to date dan profil terbit tepat waktu (3) Tata Kelola Data Profil melalui standardisasi prosedur operasional dan penguatan regulasi internal.

Dalam penelitian, peneliti mengambil pada Penguatan manajemen pengelolaan data profil Kesehatan dijadikan dalam bentuk Surat Edaran dan Policy Brief.

1. **Tahapan dalam pembuatan Surat Edaran yaitu :**

   a. Penyusunan Draft

   Draft Surat Edaran yang sudah jadi tidak langsung diserahkan ke pimpinan tertinggi, melainkan dijalankan secara berjenjang untuk mendapatkan paraf koordinasi. Setiap pejabat yang dilewati memeriksa substansi, tata bahasa, dan format naskah dinas. Jika ada koreksi, draft dikembalikan ke konseptor.

   b. Paraf Koordinasi

   Paraf Koordinasi oleh Kepala Sub bagian program dan Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan

c. Penandatanganan oleh Kepala Dinas Kesehatan

Setelah dinyatakan bersih dan disetujui (biasanya ditandai dengan paraf koordinasi lengkap di lembar disposisi/nota dinas), Surat Edaran diajukan ke pejabat berwenang (seperti Kepala Dinas, untuk ditandatangani secara resmi (menggunakan basah maupun TTE/Tanda Tangan Elektronik).

d. **Penomoran Surat**

Surat Edaran yang sudah ditandatangani diserahkan ke unit kearsipan/tata usaha untuk diberi nomor resmi sesuai kode klasifikasi arsip instansi. Setelah itu, dilakukan pengabsahan (stempel basah atau sertifikasi digital).

e. **Tahapan Pendistribusian**

Penyampaian Surat Edaran ditujukan kepada seluruh pihak terkait, baik di lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Saat ini, proses distribusi dokumen tersebut umumnya telah bertransformasi secara digital melalui Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) yang terintegrasi, atau dipublikasikan secara terbuka melalui laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) instansi guna menjamin transparansi dan aksesibilitas bagi publik.

Gambar 21
Tampilan Bukti Pendistribusian



Sumber : Data Peneliti Tahun 2026

2. **Tahapan dalam pembuatan policy brief yaitu :**

   a. Identifikasi dan Perumusan Masalah

      i. Menentukan isu kebijakan yang akan dibahas berdasarkan permasalahan aktual dan kebutuhan pengambilan keputusan.

      ii. Mengidentifikasi akar masalah, pihak yang terdampak, serta urgensi permasalahan melalui data dan fakta yang valid.

   b.* Pengumpulan dan Analisis Bukti *(Evidence-Based Analysis)

      i. Mengumpulkan data primer maupun sekunder dari hasil penelitian, laporan resmi, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan terkait.

ii. Menganalisis bukti secara sistematis untuk menggambarkan situasi, penyebab masalah, serta dampaknya.

3. **Penentuan Tujuan Kebijakan**
   a. Menetapkan tujuan yang ingin dicapai melalui kebijakan yang diusulkan.
   b. Tujuan harus spesifik, realistis, dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan.
4. **Pengembangan Alternatif Kebijakan**
   a. Menyusun beberapa pilihan kebijakan berdasarkan hasil analisis bukti.
   b. Setiap alternatif dievaluasi berdasarkan kelebihan, kekurangan, biaya, manfaat, dan kemungkinan implementasinya.
5. **Perumusan Rekomendasi Kebijakan**
   a. Memilih alternatif kebijakan yang paling efektif dan layak untuk digunakan dan diterapkan.
   b. Rekomendasi harus jelas, operasional, dan dapat dilaksanakan oleh pengambil kebijakan.
6. **Penyusunan Dokumen *Policy Brief***
   a. Menyusun dokumen secara ringkas, sistematis, dan mudah dipahami.
   b. Struktur umumnya meliputi:
   c. Judul

d. Ringkasan Eksekutif

e. Latar Belakang Masalah

f. Temuan Utama

g. Alternatif Kebijakan

h. Rekomendasi Kebijakan

i. Penutup dan Referensi

7. **Review dan Validasi**

   Melakukan penelaahan terhadap isi *policy brief* oleh rekan sejawat untuk memastikan akurasi, relevansi, dan kejelasan informasi.

8. **Diseminasi dan Advokasi Kebijakan**

   Menyampaikan *policy brief* kepada pengambil keputusan dan pihak terkait melalui forum diskusi, presentasi, atau media publikasi agar rekomendasi dapat dipertimbangkan dalam proses perumusan kebijakan.

Gambar 22
Tampilan Bukti Pendistribusian



Sumber : data Peneliti Tahun 2026